

**TESIS**

**PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM  
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BAGI PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA**



**Oleh**

**LETJON SIMANJORANG**

**NIM. 2320215310079**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**

**TESIS**

**PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM  
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BAGI PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA**



**Oleh**

**LETJON SIMANJORANG**

**NIM. 2320215310079**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**

**PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM  
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BAGI PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA**

**TESIS**

**Untuk memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**oleh**

**LETJON SIMANJORANG**

**NIM. 2320215310079**


**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**

**Judu Tesis : PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM  
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BAGI PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA**

**Nama : Letjon Simanjourang  
NIM : 2320215310079**

**Disetujui,  
Pembimbing**

  
**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
NIP. 19820610 200501 1 002**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

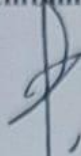
  
  
**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

  
  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

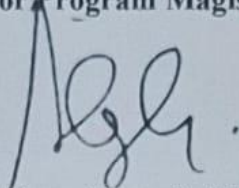
Tesis ini  
Telah diperiksa dan disetujui  
pada tanggal....

Pembimbing



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
NIP. 19820610 200501 1 002

Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



  
Dr. Adamad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal.....

### Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Saprudin, S.H., M.H.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Letjon Simanjorang

NIM : 2320215310079

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 27 Juni 2025

Yang membuat pernyataan

Letjon Simanjorang

NIM. 2320215310079

**DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 114 Halaman.**

**RINGKASAN**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi rentannya Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhadap pelanggaran hukum, terutama ketika mereka menghadapi permasalahan pidana di luar negeri. Dalam praktiknya, banyak PMI yang kurang mendapatkan perlindungan hukum yang layak saat terlibat perkara pidana, baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka. Kompleksitas yurisdiksi asing, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, perbedaan sistem peradilan pidana, dan lemahnya respons negara terhadap kasus-kasus tersebut telah menyebabkan banyak pekerja migran tidak memperoleh hak-haknya secara adil. Sementara itu, kebijakan hukum pidana nasional belum sepenuhnya memberikan jaminan keadilan dan perlindungan komprehensif bagi warga negara yang bekerja di luar negeri. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip perlindungan hukum yang diidealkan dalam sistem hukum nasional dengan realitas implementasinya dalam konteks transnasional. Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip hukum dan kebijakan hukum pidana nasional membentuk konstruksi perlindungan bagi pekerja migran yang berhadapan dengan hukum di luar negeri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengkaji prinsip-prinsip perlindungan hukum yang melekat dalam kebijakan hukum pidana nasional terhadap PMI yang terlibat perkara pidana di luar negeri. Secara khusus, penelitian ini menguraikan bagaimana norma-norma hukum pidana nasional dapat bersinergi dengan instrumen internasional dan nilai-nilai keadilan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil, efektif, dan humanistik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum ketenagakerjaan transnasional. Dari segi praktis, hasil penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang responsif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi pekerja migran. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh institusi penegak hukum, perwakilan diplomatik, dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang advokasi pekerja migran, untuk memperkuat langkah-langkah perlindungan hukum secara strategis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku baik dalam undang-undang nasional maupun dalam instrumen internasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Bahan

hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang, perjanjian internasional, dan yurisprudensi; serta bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel terkait perlindungan pekerja migran. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen secara sistematis, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan dengan metode preskriptif-analitis untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum yang relevan dan menyusun argumentasi hukum secara logis dan kritis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip perlindungan hukum bagi pekerja migran harus didasarkan pada asas keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Dalam konteks kebijakan hukum pidana nasional, belum terdapat sistem perlindungan yang menyeluruh dan terkoordinasi dalam merespons kasus-kasus pidana yang menimpa PMI di luar negeri. Kerangka yuridis yang ada masih tersebar di berbagai peraturan dan belum memiliki pengaruh langsung terhadap proses hukum yang terjadi di negara lain. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk merumuskan kebijakan pidana yang secara eksplisit memuat mekanisme perlindungan bagi PMI dalam situasi krisis hukum, termasuk penguatan fungsi diplomatik, penyediaan bantuan hukum, dan pengawasan terhadap proses peradilan yang melibatkan PMI di luar negeri. Di sisi lain, kesesuaian kebijakan hukum pidana nasional dengan prinsip-prinsip keadilan masih bersifat parsial dan belum menjangkau kebutuhan spesifik dari kelompok pekerja migran. Maka dari itu, harmonisasi antara norma nasional dan norma internasional perlu dikedepankan untuk menjamin adanya kesetaraan hak dan prosedur hukum yang adil bagi PMI.

**SIMANJORANG, LETJON. 2025. PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 114 Halaman.**

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kebijakan Hukum Pidana, Pekerja Migran Indonesia**

Penelitian ini berjudul “Prinsip Perlindungan Hukum dalam Kebijakan Hukum Pidana bagi Pekerja Migran Indonesia” yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip hukum digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan hukum pidana nasional yang ditujukan untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terlibat perkara pidana di luar negeri. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi teoritis terhadap penguatan sistem hukum pidana nasional agar lebih adaptif terhadap tantangan hukum transnasional yang dihadapi oleh PMI, serta memberikan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan, pelaksana hukum, dan institusi perlindungan PMI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan, serta bersifat preskriptif-analitis.

Meskipun prinsip-prinsip hukum seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan persamaan di hadapan hukum telah diakui secara normatif dalam berbagai perangkat hukum nasional, namun belum secara operasional dijadikan rujukan utama dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang melindungi PMI. Di berbagai kasus, perlindungan hukum terhadap PMI yang berhadapan dengan sistem hukum pidana negara lain masih bergantung pada intervensi diplomatik yang sifatnya kasuistik, bukan sebagai hasil dari sistem hukum yang terstruktur.

Kebijakan hukum pidana nasional belum sepenuhnya menunjukkan konsistensi dengan prinsip keadilan dalam memberikan perlindungan terhadap PMI. Ketiadaan norma hukum pidana nasional yang secara khusus dan sistematis mengatur tentang perlindungan PMI di luar negeri menyebabkan ketimpangan dalam perlakuan hukum, baik dari sisi substansi maupun prosedur. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu konstruksi kebijakan hukum pidana yang mampu menjamin keadilan substantif, melalui sinkronisasi dengan prinsip-prinsip hukum internasional serta reformulasi norma pidana nasional agar menjangkau konteks transnasional yang dihadapi PMI.

**SIMANJORANG, LETJON. 2025. PRINCIPLES OF LEGAL PROTECTION IN CRIMINAL LAW POLICY FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS. Master of Laws Program, Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 114 pages.**

### **ABSTRACT**

**Keywords: Legal Protection, Criminal Law Policy, Indonesian Migrant Workers**

*This research, titled “Principles of Legal Protection in Criminal Law Policy for Indonesian Migrant Workers”, aims to analyze and examine the extent to which legal principles serve as the foundation in the formulation of national criminal law policies intended to protect Indonesian Migrant Workers (PMI) involved in criminal cases abroad. The study also seeks to provide a theoretical contribution to strengthening the national criminal justice system to make it more adaptive to the transnational legal challenges faced by PMI. Additionally, it aims to offer practical benefits for policymakers, law enforcement officials, and institutions tasked with the protection of migrant workers. The research adopts a normative legal method, employing statutory, conceptual, and comparative approaches, and is prescriptive-analytical in nature.*

*Although fundamental legal principles such as justice, legal certainty, and equality before the law have been normatively recognized within various national legal instruments, they have yet to be operationalized as the central framework in the development of criminal law policies aimed at protecting PMI. In many cases, legal protection for PMI facing criminal justice systems abroad still heavily relies on ad hoc diplomatic interventions rather than on a structured and systematic legal response.*

*Moreover, national criminal law policies have not yet demonstrated consistency with the principles of justice in ensuring protection for PMI. The absence of specific and systematic national penal provisions addressing the legal protection of migrant workers abroad has led to disparities in legal treatment, both substantively and procedurally. Therefore, it is essential to construct a comprehensive criminal law policy capable of ensuring substantive justice, through the harmonization of domestic norms with international legal principles and the reformulation of penal regulations to address the transnational context faced by PMI.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Prinsip Perlindungan Hukum dalam Kebijakan Hukum Pidana bagi Pekerja Migran Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum, pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan tesis ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi berarti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan izin, dukungan akademik, serta fasilitas selama proses studi dan penyusunan tesis ini berlangsung.
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membimbing dan memberikan arahan administratif dan akademik secara berkelanjutan demi kelancaran studi penulis.
3. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M., selaku Pembimbing Ketua, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan komitmen akademik telah membimbing penulis dalam proses penyusunan tesis ini, baik dalam aspek substansi hukum maupun metodologi penelitian.
4. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas ilmu pengetahuan, pengalaman, serta motivasi yang telah diberikan selama masa perkuliahan, yang menjadi landasan intelektual dalam proses penyusunan tesis ini.

5. Rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah menjadi mitra diskusi, berbagi informasi, dan memberi semangat selama proses penulisan dan studi berlangsung.
6. Seluruh staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional dalam membantu segala keperluan akademik penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, baik dari sisi teknis penulisan maupun kedalaman analisis substansi hukum. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperkuat sistem perlindungan hukum pidana bagi Pekerja Migran Indonesia, dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Banjarmasin, Juni 2025  
Penulis,

**Letjon Simanjorang**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL DALAM .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	v
HALAMAN PERNYATAAN ..	vi
RINGKASAN .....	vii
ABSTRAK .....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian .....	29
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	36
<b>BAB II PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG TERLIBAT PERKARA PIDANA DI LUAR NEGERI.....</b>	<b>38</b>
A. Prinsip-Prinsip Hukum yang Menjamin Perlindungan terhadap Pekerja Migran dalam Perkara Pidana.....	38
B. Konstruksi Kebijakan Hukum Pidana Nasional dalam Merespons Perkara Pidana terhadap Pekerja Migran...	50
C. Konsistensi Norma Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran dengan Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Hukum Pidana.....	62

<b>BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM YANG ADIL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI.....</b>	<b>79</b>
A. Kerangka Yuridis Nasional dalam Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pekerja Migran Indonesia .....	79
B. Arah dan Tujuan Kebijakan Hukum Pidana dalam Menjamin Keadilan bagi Pekerja Migran .....	88
C. Kesesuaian Kebijakan Hukum Pidana Nasional dengan Prinsip Keadilan dalam Perlindungan Pekerja Migran.....	101
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	113

#### **DAFTAR PUSTAKA**